

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KARAKTERISTIK DEWAN
KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA
PERUSAHAAN DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI)**

Sulung Aniroh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 165 Malang

Sulung.aniroh@yahoo.com

ABSTRAK

This study aims to obtain empirical evidence about the influence of ownership structure and board characteristics on voluntary disclosure in the annual reports of existing companies in Indonesia Stock Exchange (ISX) in 2010 and 2011. Ownership structure is characterized by managerial ownership, blockholder ownership and government ownership, and board characteristic is characteristic by independent directors, size of directors and skill of directors. Control variables are leverage, firm size and profitability. The population of this study is all companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010 and 2010. The total sample was 130 companies, with two years of observations. So the total sample who checked is 260. Data analysis was performed with the classical assumption and hypothesis testing using linear regression. The results of this study indicate that the factor of government ownership, size of directors, leverage and firm size significantly influence the voluntary disclosure. Meanwhile, managerial ownership, blockholder ownership, independent directors, skill of director, and profitability has no significant impact on voluntary disclosure.

Keywords: *Voluntary disclosure, managerial ownership, blockholder ownership, government ownership, independent directors, size of directors and skill of directors.*

1. PENDAHULUAN

Isu hangat yang banyak menarik perhatian para pelaku bisnis adalah mengenai *GoodCorporate Governance* (GCG), karena GCG merupakan faktor penentu keberhasilan perusahaan di masa depan. Menurut Arifin (2005), sejak adanya krisis

finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia ini dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di negara-negara Asia.

Menurut Becelius (2002) dan Herwidayatmo (2000) lemahnya praktik GCG di Indonesia antara lain adalah (1) minimnya keterbukaan perusahaan berupa pelaporan kinerja keuangan, (2) tidak efektifnya dewan komisaris sebagai organ pengawasan terhadap aktivitas manajemen, (3) ketidakmampuan akuntan dan auditor memberi kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan, dan (4) adanya konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan. Lemahnya implementasi *good corporate governance* akan menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa profit yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders*.

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh McKinsey Investor Opinion Survey (2000) sebagaimana dikutip oleh Bacelius (2002), Indonesia merupakan negara terburuk dalam penerapan GCG. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, sehingga perlu adanya peran aktif dari semua pihak yang terlibat dalam perbaikan penerapan GCG yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja perusahaan.

Isu GCG sesungguhnya sudah lama dikenal di negara-negara Eropa dan Amerika dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan atau manajemen (Arifin, 2005). Permasalahan timbul ketika, ada kepentingan yang berbeda antara principal sebagai pemilik atau pemegang saham dan agen sebagai manajemen (Herwidayatmo, 2000). Dalam literatur akuntansi pemisahan ini disebut dengan teori keagenan (*Agency Theory*). Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*). Agen yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi atas kepemilikannya dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Keadaan ini akan menimbulkan *Agency Problem* yang disebut dengan *Asymetry Information* atau informasi yang tidak seimbang karena adanya distribusi yang tidak sama antara principal dan agen.

Keadaan diatas akan mengakibatkan manajer bertindak tidak transparan dalam praktik pelaporan keuangan yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Akibat adanya perilaku manajer yang tidak transparan dalam penyajian informasi akan menjadi penghalang praktik GCG, karena salah satu prinsip GCG adalah *transparency* atau keterbukaan (Arifin, 2005).

Berdasarkan penjelasan diatas, keterbukaan merupakan hal yang sangat penting dalam perbaikan penerapan GCG di perusahaan-perusahaan Indonesia. Penyajian informasi akuntansi yang lengkap dan relevan dalam laporan tahunan perusahaan

sangat diperlukan, karena hal ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. GCG merupakan suatu cara yang diyakini oleh penelitian terdahulu untuk menjamin manajemen bertindak atas kepentingan *stakeholders*. Menurut Yuniasih *et al* (2011) bentuk dan luas pengungkapan informasi sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan.

Beberapa riset membuktikan bahwa pengungkapan sukarela dapat mengurangi kesenjangan antara pemegang saham dan manajemen (Sheu *et al*, 2007). Penelitian tentang pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri. Pada tahun 2003, Eng dan Mak meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela perusahaan di Singapura dengan 158 sampel. Struktur kepemilikan terbagi menjadi kepemilikan manajerial, kepemilikan *blockholder* dan kepemilikan pemerintah. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa kepemilikan manajerial rendah dan kepemilikan pemerintah yang signifikan dapat meningkatkan pengungkapan sukarela. Variabel kepemilikan *blockholder* dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan uraian diatas terdapat fenomena kasus tentang pasar modal yang berhubungan dengan keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan. Selama penelitian ini dilakukan, di Indonesia masih belum ada penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela, padahal kedua aspek tersebut merupakan komponen penting dalam mekanisme GCG. Penelitian ini ditujukan untuk lebih bisa menggambarkan kondisi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sesungguhnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela.

2. LANDASAN TEORI

Agency Theory

Good Corporate Governance diawali dengan munculnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. *Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya (Arifin, 2005).

Konsep *Agency Theory* menurut Scott (2007:305) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal.

Dalam teori keagenan (*Agency Theory*), hubungan agensi akan muncul ketika satu orang atau lebih (*Principal*) memberikan kepercayaan kepada orang lain (*Agen*) untuk mengelola suatu bisnis dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Oleh karena itu sebagai pengelola, *agen* (manajemen) berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada *principal* (pemilik). Salah satu bentuk informasi yang diberikan adalah pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya, hubungan antara pemilik dan pihak manajemen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*Asymmetrical Information*) karena biasanya manajemen cenderung pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan daripada pemilik. Manajemen cenderung memaksimalkan kepentingannya, sehingga hal tersebut mendorong mereka untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pemilik (Ismoyowati, 2011).

Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, FCGI (2002) definisi *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Adapun tujuan dari *Corporate Governance* yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua kepentingan semua pihak.

Terdapat lima prinsip pokok *corporate governance* dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu: perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan stakeholders dalam corporate governance, keterbukaan dan transparansi, dan peranan dewan komisaris dalam perusahaan.

Sedangkan menurut dalam Pedoman Umum *good corporate governance* Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance prinsip-prinsip *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. *Transparency* (Transparansi).
Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya yang menyangkut kondisi keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan saham.
2. Akuntabilitas
Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
3. Responsibility

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

4. *Fairness* (Keadilan).

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

5. *Independensi* (*Independency*)

Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

Hipotesis

Besarnya kepemilikan saham manajer dapat mengurangi *agency cost* karena berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham lain (Jensen dan Meckling, 1976). Pengawasan dari *outside shareholder* dapat mengurangi *Agency Problem*, jika manajer dapat menerbitkan pengungkapan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Sheu *et al* (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan sukarela, ini mengidentifikasikan kepemilikan manajerial meningkat diikuti dengan peningkatan pengungkapan sukarela. Hal ini bisa terjadi karena keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham, penelitian ini didukung oleh Purwandari (2012), Diyanti (2011) dan Syafitri (2009). Dari uraian di atas maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Kepemilikan *blockholder* merupakan sebagai shareholder yang kepemilikannya paling sedikit 5% atas saham perusahaan. Jansen and Mackling (1976) mengemukakan bahwa, pemegang saham potensial diharapkan mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam memonitoring manajemen, karena kinerja mereka terkait erat dengan kinerja keuangan perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Aktaruddin (2009), Xiao dan Yuan (2007) dan Nuryaman (2009). Oleh karena itu diharapkan bahwa pengungkapan sukarela meningkat, dengan meningkatnya kepemilikan *Blockholder*. Dari uraian di atas maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Blockholder berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Tekanan pemerintah dan publik yang kuat membuat perusahaan harus lebih transparan dalam pengelolaannya. Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai salah satu media pelaporan pertanggungjawaban manajemen mereka sebagaimana diatur dalam UU PT No. 40 Tahun 2007. Pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan. Menurut Eng dan Mak (2003) dan

Farahdiba (2012) semakin besar kepemilikan pemerintah maka perusahaan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh karena itu diharapkan bahwa pengungkapan sukarela meningkat, dengan peningkatan kepemilikan pemerintah. Dari uraian di atas maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismoyowati (2011) ada pengaruh positif dan signifikan dari dewan komisaris terhadap luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan. Keberadaan komisaris independen mendukung prinsip responsibilitas dalam implementasi *corporate governance*, yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Penelitian ini didukung oleh Xiao dan Huafang (2007), Cheng dan Courtenay (2004), Aktaruddin (2009), Karagul dan Yonet (2010) dan Clemente (2009), dan Diyanti (2011). Oleh karena itu, komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Dari uraian di atas maka hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Utami *et al*, berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris yang diproksikan dengan jumlah personil dewan komisaris dan independensi dewan komisaris, menunjukkan pengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka perusahaan akan semakin transparan dalam pengungkapan informasi. Penelitian ini didukung oleh Aktaruddin (2009), Karagul dan Yonet (2010), Sheu *et al* 2007), Janadi (2013), Budianawati (2009) dan Sambiring (2005). Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Dari uraian di atas maka hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Menurut Nuryaman *et al* (2010) bahwa kompetensi dewan komisaris memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan sukarela, makna dari penelitian ini adalah kehadiran anggota dewan komisaris yang memiliki keahlian di bidangn akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan pengawasan dewan kepada manajemen dalam praktik transparansi dan pengungkapan sukarela dalam lapora tahunan. Penelitian ini dukudukng oleh Utomo (2012). Oleh karena itu, keahlian dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Dari uraian di atas maka hipotesis keenam dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6: Keahlian Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang *listing* (terdaftar) diperoleh dari perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 dan 2011 (489 perusahaan). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang tidak acak yang mempunyai kriteria dan tujuan tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk memilih perusahaan adalah sebagai berikut: 1) Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (annual report) secara konsisten di webside BEI dari tahun 2010 sampai 2011.2)Perusahaan yang memiliki laba positif.3)Perusahaan tersebut menyajikan seluruh informasi dengan data yang diperlukan dalam pengukuran variabel yang digunakan pada laporan tahunan.4)Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah.5)Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember. Berdasarkan criteria tersebut diperoleh 130 perusahaan selama dua tahun, jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 260 perusahaan.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan sukarela. Untuk tingkat pengungkapan, penulis menggunakan *content analysis* atas laporan tahunan perusahaan sampel dengan membentuk Indeks Pengungkapan Sukarela tanpa pembobotan, yaitu dengan melihat item informasi ada tidaknya dalam pengungkapan. Setiap item informasi yang diungkapkan diberi angka 1 (satu), dan setiap item informasi yang tidak diungkapkan diberi angka 0 (nol). Pembuatan daftar item pengungkapan didasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Berdasarkan keputusan BAPEPAM tersebut terdapat 76 item pengungkapan. Indeks pengungkapan sukarela dihitung dengan membagi skor total pengungkapan sukarela perusahaan dengan skor pengungkapan sukarela maksimum (76).

Variabel Independen

Kepemilikan manajerial diukur dengan presentase kepemilikan manajerial perusahaan (kepemilikan komisaris dan direktur) terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan *blockholder* diukur dengan presentase saham yang dimiliki oleh pihak selain manajemen (komisaris dan direktur) yang lebih dari 5% terhadap total saham yang beredar. Besarnya saham pemerintah diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham pemerintah terhadap total saham perusahaan. Dihitung dengan membagi proporsi jumlah komisaris independen terhadap jumlah seluruh komisaris. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah total anggota dewan komisaris (UDK) dengan merubah dalam bentuk logaritma. Keahlian dewan komisaris diukur dengan cara mencari persentase dari jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan terhadap jumlah anggota dewan komisaris keseluruhan.

Variabel kontrol

Leverage diukur dengan membagi total kewajiban dan total aktiva. Ukuran perusahaan (firm size) diproksikan dengan total aktiva yang dirubah dalam bentuk logaritma. Sedangkan profitabilitas diukur dengan earnings after tax dengan total asset.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari variabel penelitian ini selanjutnya diperoleh data penelitian sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPS	260	.3200	.8700	.635808	.0894067
KM	260	.0000	.4400	.026568	.0700043
KB	260	.0000	.9818	.359874	.2832184
KP	260	.0000	.9000	.046070	.1714191
DKI	260	.2000	.8000	.413811	.1182174
UDK	260	2	10	3.87	1.358
KDK	260	.0000	1.0000	.420969	.2432073
L	260	.0100	3.2100	.517556	.3909095
FS	260	18.8856	34.9542	28.210361	2.0002846
ROA	260	.0001	.5096	.079675	.0868075
Valid N (listwise)	260				

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dari total sampel 260 perusahaan Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS) memiliki nilai minimum 32 % dan nilai maksimum 87%. Rata-rata pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan di Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 63,58%, hal ini menunjukkan perusahaan sampel sudah mematuhi peraturan yang berlaku tentang penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik (BAPEPAM No. Kep-134/BL/2006).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi berganda, dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.

Tabel 3

Variabel	Multikolinieritas		Heterokodestisitas
	Tolerance	VIF	
KM	.928	1.077	.078
KB	.853	1.173	.332
KP	.820	1.219	.952
DKI	.928	1.078	.317
UDK	.765	1.307	.180
KDK	.904	1.106	.940
L	.946	1.057	.287
FZ	.833	1.201	.271
ROA	.932	1.073	.104
Uji Autokorelasi	Durbin Watson		1.902
Uji Normalitas	Kolmogorov-Smirnov Z		.634
	Asymp. Sig. (2-tailed)		.817

1. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika $\text{tolerance} \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} \geq 10$ maka terdapat multikolonieritas yang tidak dapat di toleransi dan variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan tidak ada variabel KM, KB, KP, DKI, UDK, KDK, L, FZ, ROA yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 begitu pula dengan VIF tidak ada yang diatas 10. Jadi dapat disimpulkan variabel independen dan variabel kontrol yang digunakan dalam model regresi dalam penelitian ini terbebas dari multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai mutlak residual dengan variabel-

variabel bebasnya. Dasar pengambilan keputusan jika variabel-variabel independen memiliki nilai probabilitas atau signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa semua variabel independen maupun variabel control (KM, KB, KP, DKI, UDK, KDK, L,FZ, ROA) memiliki tingkat kepercayaan diatas 5%. Dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson berada di atas nilai tabel d_U atau lebih kecil dari d_U menunjukkan adanya gejala autokorelasi dalam model regresi. Nilai DW_{hitung} sebesar 1,902 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 260 dan jumlah variabel independen dan variabel kontrol adalah 9. $DL = 1.73369$, $d_u = 1.86041$; $4 - 1.86604 = 2.1395$. Dari perhitungan disimpulkan tersebut bahwa nilai DW_{hitung} lebih besar daripada batas atas 1,8604 dan lebih kecil daripada $4 - d_u = 4 - 1,8604 = 2,1395$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat ditentukan dengan melihat distribusi residual dari model regresi. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Data yang normal diperoleh apabila nilai signifikansi pengujian berada di atas 0,05. Dari tabel 3 besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,634 dengan tingkat signifikansi diatas 0,05 yaitu 0,817. Dengan kata lain bahwa KS tidak signifikan, berarti residual terdistribusi secara normal, berarti uji KS konsisten dengan grafik histogram dan grafik normal probability plot.

Pengujian Hipotesisi

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model regresi berganda (*multiple regressions*).

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel dibawah ini menunjukkan bahwa besarnya *adjusted*(R^2) sebesar 0,125 hal ini berarti 12,5% pengungkapan sukarela dapat dijelaskan oleh variasi dari enam variabel independen dan 3 variabel kontrol. Sedangkan sisanya ($100\% - 12,5\% = 87,5\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Tabel 7
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Statistik t	Sig.
KM	.091	1.175	.241
KB	-.023	-1.177	.240
KP	.072	2.142	.033

DKI	-.065	-1.424	.156
UDK	.011	2.494	.013
KDK	-.033	-1.485	.139
L	-.032	-2.317	.021
FZ	.006	2.039	.042
ROA	.009	.141	.888
R	.394		
R^2	.155		
Adjusted R^2	.125		
F	5.111		
Sig.	.000		

2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Penelitian ini menggunakan tabel ANOVA atau F test, dari tabel 4.10 diperoleh nilai F hitung sebesar 5,111 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi KM, KB, KP, DKI, UDK, KDK, F, FS, dan ROA tidak sama dengan nol, atau kesembilan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan sampel.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hipotesis diterima apabila nilai probabilitas lebih kecil dari : 5% ($R^2 \leq 0,05$). Tabel berikut menunjukkan uji statistic t dalam penelitian ini:

- a. Variabel kepemilikan manajerial (KM) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,091. Variabel KM tidak signifikan secara statistik karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha : 5\%$ yaitu 0,241. Maka, hipotesis pertama menyatakan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela ditolak. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Diyanti (2011) dan Purwandari (2012), namun penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Xiao dan Yuan (2007), Pramunia (2010), Irmayanti (2011), Ismoyowati (2011), dan Puspitaningrum (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan proporsi yang tinggi akan menimbulkan *agency problem*, karena perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik. Kepentingan pribadi manajemen belum dapat diselaraskan dengan kepentingan pemilik maupun perusahaan, sehingga belum mampu mengurangi perilaku oportunistik secara menyeluruh. Dengan

adanya perbedaan tujuan antara pemilik dan manajemen tentu saja akan menimbulkan *agency cost*.

- b. Variabel kepemilikan *blockholder* (KB) memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,023. Variabel KM tidak signifikan secara statistik karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha : 5\%$ yaitu 0,240. Maka, hipotesis kedua menyatakan kepemilikan *blockholder* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela ditolak. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Nuryaman (2009). Hasil penelitian ini didukung oleh Eng dan Mak (2003) yang menyatakan bahwa kepemilikan *blockholder* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Puspitaningrum (2008) dan Oktaviana (2009) yang menyatakan bahwa kepemilikan *blockholder* tidak mampu memengaruhi tingkat pengungkapan sukarela.

Hasil penelitian juga tidak mampu mendukung pernyataan Jansen and Mackling (1976) yang mengemukakan bahwa pemegang saham potensial diharapkan mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam memonitoring manajemen, karena kinerja mereka terkait erat dengan kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan *blockholder* yang tinggi seharusnya dapat meningkatkan pengawasan oleh pihak luar terhadap kinerja manajemen. Dengan adanya pengawasan oleh pihak luar, maka akan membuat manajemen lebih terdorong dalam pengungkapan informasi yang lebih transparan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik. Namun pada kenyataannya, kepemilikan saham potensial pada perusahaan sampel tidak mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan besar karena pengawasan oleh *blockholder* belum maksimal. Selain itu menurut Chau dan Gray (2002) dalam Oktaviana (2009) struktur kepemilikan perusahaan Indonesia cenderung terkonsentrasi, sesuai dengan ciri-ciri bentuk kepemilikan perusahaan yang ada di Asia, termasuk Indonesia. Berdasarkan temuan mereka, dengan adanya struktur kepemilikan terkonsentrasi maka perusahaan-perusahaan tersebut tidak termotivasi untuk melakukan pengungkapan selain pengungkapan wajib. Hal ini terjadi karena sedikitnya kepemilikan saham oleh pihak *outsider* (minoritas) dibandingkan dengan kepemilikan pihak *blockholder* sehingga menyebabkan permintaan akan pengungkapan sukarela perusahaan tidak begitu besar dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar (kepemilikan *outsider* yang tinggi).

- c. Variabel kepemilikan pemerintah (KP) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,072. Variabel KM memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari pada $\alpha : 5\%$ yaitu 0,033. Hal ini berarti penambahan kepemilikan saham oleh pemerintah sebanyak 1% akan meningkatkan rasio tingkat pengungkapan sukarela sebesar 7,3% dengan asumsi variabel independen lainnya dalam keadaan konstan. Maka, hipotesis ketiga menyatakan kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eng dan Mak

(2003), yang menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif antara kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan sukarela.

Adanya hubungan antara kepemilikan saham pemerintah dengan luas pengungkapan sukarela mengandung arti semakin besar kepemilikan pemerintah maka semakin banyak informasi yang akan diungkapkan oleh perusahaan. Keadaan ini terjadi karena apabila suatu perusahaan memiliki persentase kepemilikan saham oleh pemerintah yang tinggi, maka keberadaan perusahaan tersebut akan lebih disorot oleh *stakeholder*-nya termasuk pemerintah. Perhatian dan tekanan pemerintah yang besar membuat perusahaan harus lebih transparan dalam pengelolaannya. Dengan kepemilikan pemerintah dalam jumlah yang besar akan menyebabkan pihak luar perusahaan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen. Bagi manajemen, pengawasan oleh pihak luar akan mendorong mereka untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan melakukan pengelolaan secara transparan.

- d. Variabel komposisi dewan komisaris independen (DKI) memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,065. Variabel KM tidak signifikan secara statistik karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha : 5\%$ yaitu 0,156. Maka, hipotesis keempat menyatakan komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela ditolak. Menurut FCGI (2001: 7) kepemilikan saham terpusat dalam satu kelompok atau satu keluarga dapat memengaruhi independensi dewan komisaris, karena pemberian jabatan dewan komisaris, berdasarkan rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga atau kenalan dekat. Di Indonesia, mantan pejabat pemerintahan ataupun yang masih aktif, biasanya diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan dengan tujuan agar mempunyai akses ke instansi pemerintah yang bersangkutan. Sehingga integritas dan independensi dewan komisaris diragukan karena adanya hubungan istimewa, dengan kata lain ada atau tidaknya dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perusahaan.
- e. Variabel ukuran dewan komisaris (UDK) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,011. Variabel UDK memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari pada $\alpha : 5\%$ yaitu 0,013. Hal ini berarti penambahan dewan komisaris sebanyak 1 orang akan meningkatkan rasio tingkat pengungkapan sukarela sebesar 1,1% dengan asumsi variabel independen lainnya dalam keadaan konstan. Maka, hipotesis kelima menyatakan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela diterima. Hasil yang konsisten diungkapkan oleh Fitri (2012), yang membuktikan bahwa semakin kecil ukuran dewan komisaris maka semakin besar nilai perusahaan tersebut. Pernyataan ini didukung oleh Darlis *et al* (2009) berpendapat jika jumlah dewan komisaris suatu perusahaan semakin banyak ada kecenderungan akan diiringi dengan penurunan jumlah pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini disebabkan karena jumlah dewan komisaris yang terlalu besar dianggap kurang efektif dalam memonitor dan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan karena sulit untuk berkomunikasi dan

berkoordinasi dalam pengambilan keputusan (Noviawan, 2013; Nuryaman *et al*, 2010).

- f. Variabel keahlian dewan komisaris (KDK) memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,033. Variabel KM tidak signifikan secara statistik karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha : 5\%$ yaitu 0,139. Maka, hipotesis keenam menyatakan keahlian dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela ditolak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Yuniasih (2011), yang menyatakan bahwa kompetensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi.

Tidak adanya pengaruh antara keahlian dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela disebabkan karena, pendidikan tidak hanya diperoleh melalui jalur formal. Kemampuan anggota dewan komisaris juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki. Selain itu, pelatihan dan kursus juga dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk mengungkapkan suatu informasi termasuk pengungkapan informasi. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan formal bukan merupakan satu-satunya faktor yang akan memengaruhi keputusan untuk melakukan pengungkapan informasi.

- g. Variabel leverage (L) memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,032. Variabel L memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari pada $\alpha : 5\%$ yaitu 0,021. Hal ini berarti penambahan nilai leverage sebanyak 1% akan meningkatkan rasio tingkat pengungkapan sukarela sebesar 3,2% dengan asumsi variabel independen lainnya dalam keadaan konstan. Hal ini berarti leverage memiliki pengaruh negative signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010).

Hasil penelitian ini juga tidak konsisten dengan teori Jansen dan Mackling (1976) yang menyatakan pengaruh yang positif ini dikarenakan berdasarkan teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dikarenakan biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Keadaan ini bisa terjadi karena perusahaan cenderung menutupi informasi-informasi yang menjadi kekurangan perusahaan agar para kreditor dan pemegang saham tidak mengetahui kekurangan tersebut. Perusahaan dianggap tidak dapat mengelola perusahaan dengan baik. (Fitriah, 2007 dalam Purwandari, 2008).

- h. Variabel firm size (FS) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,006. Variabel KM tidak signifikan secara statistik karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha : 5\%$ yaitu 0,042. Maka, firm size tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Menurut Teory Agency perusahaan besar mempunyai biaya keagenan yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil (Jansen dan Meckling, 1976). Tingginya biaya keagenan dikarenakan perusahaan besar mempunyai shareholder yang banyak dan tersebar. Adanya hubungan keagenan antar principal dan agen telah membebani manajemen untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya (Puspitaningrum, 2012). Maka, untuk mengurangi biaya keagenan,

perusahaan besar dapat melakukan pengungkapan lebih transparan guna mengurangi biaya keagenan.

- i. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,009. Variabel KM tidak signifikan secara statistik karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha : 5\%$ yaitu 0,999. Maka, profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Purwandari (2008).

Tingkat profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela karena kondisi perekonomian yang kurang stabil. Banyak perusahaan yang profitabilitasnya menurun sehingga informasi mengenai profitabilitas tidak terlalu diperhatikan. Terlebih lagi rata-rata tingkat profitabilitas sangat kecil yaitu 7,9%. Oleh karena itu profitabilitas yang rendah tidak menghambat perusahaan dalam mengungkapkan informasi sukarela dengan tujuan untuk menunjukkan keterbukaan manajemen perusahaan dalam melaporkan informasi keuangan perusahaan (Purwandari, 2008).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dalam bab sebelumnya maka, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, komposisi dewan komisaris independen, keahlian dewan komisaris, firm size, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan sampel.
2. Kepemilikan pemerintah, ukuran dewan komisaris, dan leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan sampel.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan keterbatasan di atas maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah:

1. Pengambilan sampel diharapkan dapat lebih banyak, sehingga didapatkan hasil yang berbeda, maka semua variabel yang terkait dapat berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.
2. Penelitian ini menggunakan kepemilikan tertinggi untuk kepemilikan saham oleh pihak *blockholder*, yang tidak memisahkan antara kepemilikan individual maupun institusional. Kemungkinan ada pengaruh berbeda dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap keputusan pengungkapan sukarela perusahaan sampel.
3. Nilai R^2 sangat kecil (0.125), hal ini berarti hanya 12,5% variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil variabel lain untuk dapat meningkatkan nilai R^2 .

Misalnya kepemilikan asing, kepemilikan publik, jenis kelamin dewan komisaris dan pendidikan dewan komisaris.

4. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan terdapat pemberian bobot terhadap indeks pengungkapan sukarela dengan tujuan menghasilkan tingkat pengukuran sukarela yang berbeda dan hasil yang berbeda.
5. Dalam penelitian ini menunjukkan intergritas dewan komisaris independen, yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, hal ini terjadi karena pemilihan dewan komisaris independen berdasarkan rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga atau kenalan dekat. Disarankan untuk pemilihan dewan komisaris independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan dengan selektif, yang selanjutnya dapat membawa perusahaan dalam kondisi yang lebih baik dengan peran dewan komisaris yang berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktaruddin, Mohamed dkk. 2009. "Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms". *Jamar, Volume 7, Nomor 1*
- Arifin. 2005. "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governand Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan". *Disampaikan pada sidang senat Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Baceliuss, Ruru. 2002. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di Lingkungan BUMN". *Disampaikan dalam Rapat Koordinasi BUMN, 17-18 April.*
- Baskarangingrum, Made Ratih dan Merkusiwati, Ni Ketut Lely A. 2013. "Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Tahunan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Studi pada Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia 2010-2011)". *Jurnal*
- Budianawati, Ayu. 2009. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital (Studi pada Perbankan Syariah di Asia)". *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*
- Cheng, Eugene C.M., dan Courtenay, Stephen M. 2004. "Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure". *Jurnal of Accounting.*
- Clemente, Ana Gisbert. 2009. "Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure, The Role of Independent Directors in the Boards of Listed Spanish Firms". *Jurnal of Accounting.*

- Darlis, Edfan dan Zulmi, Nizar. 2009. "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Tingkat Leverage dan Tingkat Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan Hidup (Studi Empiris pada Laporan Keuangan Perusahaan Rawan Lingkungan yang Liating di BEJ Periode 2004-2006)". *Jurnal Ekonomi, Volume 17 Nomer 3, Desember 2009*.
- Diyanti, Ferry. 2011. "Mekanisme Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Mandatory Disclosure: Studi Empiris pada Perusahaan Mnaufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal*.
- Eng, L.L dan Mak, Y.T. 2003."Corporate Governance and Voluntary Disclosure".*Journal of Accounting and Public Police*.22,325-345.
- Farahdiba. 2012. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Laporan Corporate Social Responbility (CSR) pada Laporan Tahunan di Indonesia". *Skripsi Mahasiswa S1, Makassar: FEB Universitas Hasanuddin*.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia(FCGI). 2002. "Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Jilid II "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Melaksanakan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)". Jakarta.
- Fitri, Dian Oriana. 2012. "Analisis Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan Sukarela dengan Efektivitas Dewan Komisaris Sebagai Variabel Moderasi". *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok*.
- Ghazali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herwidayatmo.(2000). 'Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia'.*Majalah Usahawan, Oktober, No.10/Th.XXIX*.
- Istanti, Sri Layla Wahyu. 2009. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Modal Intelektual". *Tesis Mahasiswa S2. Semarang: Progam Studi Sains Akuntansi: Universitas Diponegoro*.
- Irawan, Bambang. 2006. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Skripsi Mahasiswa S-1: FE Universitas Islam Indonesia*.
- Irmayanti, Fransiska Dian. 2011. "Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Sukarela Terhadap Asimetri Informasi Selama Krisis Finansial Global (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)". *Skripsi Mahasiswa S-1: FE Universitas Sebelas Maret*.

- Ismoyowati, Nurbuana Tanjung. 2011. “Pengaruh Indeks Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public di Indonesia tahun 2003-2007)”. *Jurnal*.
- Janadi, Jasen Al. 2013. “Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia”. *Journal of Finance and Accounting volume 4*, nomor 4
- Jansen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, Journal of Financial Economics”. *Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360*.
- Karagul, Arman Aziz, dan Yonet, Nazli Kepce. 2009. “Impact of Board Characteristics and Ownership Structure on Voluntary Disclosure: Evidence from Turkey”. *Jurnal of Accounting*.
- Kurniawan, Yulius Adi. 2013. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela pada Laporan Tahunan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia”. *Thesis S1*.
- Marzuly, Nur dan Priantinah, Denies. 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility di Inonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)”. *Jurnal Nominal, Volume 1 nomor 1, 2012*.
- Mora, Angga. 2011. “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *Skripsi Mahasiswa S-1: FE Universitas Sebelas Maret*.
- Noviawan, Ridho Alief dan Septi, Aditya. 2013. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan”. *Diponegoro Journal of Accounting, volume 2, nomor 3, 2013*.
- Nuryaman dan Rusmini. 2010. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakteristik Dewan Komisaris, Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi pada Emiten Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)”, *Tesis Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung*.
- Nuryaman. 2009. “Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap pengungkapan sukarela”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia volume 6 nomer 1*.
- Oktaviana, Ardiasih. 2009. “Analisis Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sukarela”. *Skripsi Mahasiswa S-1. Depok: FE UI*.

- Pramunia,Agy. 2012. "Pengaruh Corporate Governance dan Financial Distressed Terhadap Luas Pengungkapan".*Skripsi Mahasiswa S-1.Semarang: FE Universitas Diponegoro.*
- Purwandari, Arum., 2012. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage,Struktur Kepemilikan, dan Status Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Skripsi Mahasiswa S-1, Semarang: FEB Universitas Diponegoro.*
- Puspitaningrum, Dara dan Atmini, Sari. 2008. "Corporate Governance Mechanism and The Level of Internet Financial Reporting: Evidence from Indonesia Companies". *Procedia Economics and Finance 2, 157-166.*
- Sheu, Her Jiun dan Kawan-Kawan. 2007. "The Determinants of Voluntary Disclosure of Directors' Compensation: Empirical Evidence from an Emerging Market". *Jurnal.*
- Syafitri, Dyan. 2009. "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Jkarta Islamic Index". *Jurnal.*
- Utami, Indah Dewi dan Rahmawati. 2012. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Umur Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Propertu dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal.*
- Wahyuni. 2012. "Pengaruh Inventory Turnover, Days Sales Outstanding dan Debts Ratio Terhadap Return On Assets (ROA) pada PT Unilever Indonesia Tbk 2008-2011". *Jurnal.*
- Wicaksono, Bintang Bagus. 2011. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan pada Pengungkapan Sukarela Perusahaan". *Jurnal.*
- Wiguna, Putu Wisnu. 2012. "Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Likuiditas pada Luas Pengungkapan Sukarela". *Jurnal.*
- Xiao,Huafang dan Yuan, Jianguo. 2007. "Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: Evidence from listed companies in China" *Managerial Auditing Journal, 22, 604-619.*
- Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma. 2012. "Pengaruh Diversitas Dewan Pada Luas Pengungkapan Modal Intelektual". *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.*

LAMPIRAN

Lampiran 1

No.	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	ADMG	Polychem Indonesia
2	AGRO	Bank Agroniaga
3	AHAP	Asuransi Harta Aman Pratama
4	ALKA	Alaska Industrindo
5	AMFG	Asahimas Flat Glass
6	ANTM	Aneka Tambang (Persero)
7	APLN	Agung Prodomo Land
8	ASII	Astra International
9	ASRM	Asuransi Ramayana
10	BAPA	Bekasi Asri Pemula
11	BAYU	Bayu Buana
12	BCIP	Bumi Citra Permai
13	BEKS	Bank Eksekutif International
14	BISI	Bisi International
15	BKSL	Sentul City
16	BNBA	Bank Bumi Artha
17	BNGA	Bank CIMB Niaga
18	BNII	Bank Internasional Indonesia
19	BRAU	Berau Coal Energy
20	BRNA	Berlina
21	BSIM	Bank Sinarmas
22	BTPN	Bank Tabungan Pensiun Nasional
23	BWPT	BW Plantation
24	CMPP	Centris Multi Persada Pratama
25	COWL	Cowell Development
26	CSAP	Catur Sentosa Adiprana
27	CTRP	Ciputra Property
28	DEFI	Danasupra Erapacific
29	DLTA	Delta Djakarta
30	DNET	Dyviacom Intrabumi
31	DUTI	Duti Pertiwi
32	EMTK	Elang Mahkota Teknologi
33	ETWA	Eterindo Wahanatama
34	FISH	FKS Multi Agro
35	GMTD	Gowa Makassar Tourism

36	GPRA	Perdana Gapuraprima
37	GREN	Evergreen Invesco
38	HADE	HD Capital
39	HERO	Hero Supermarket
40	HOME	Hotel Mandarine Regency
41	HRUM	Harum Energy
42	INDS	Indospring
43	INTA	Intraco Penta
44	ISAT	Indosat
45	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama
46	KBLM	Kabelindo Murni
47	KRAS	Krakatau Steel
48	LAMI	Lamicitra Nusantara
49	LAPD	Leyand International
50	LMPI	Langgeng Makmur Industri
51	MAPI	Mitra AdiperkasaSkybee
52	MAYA	Bank Mayapada
53	MDRN	Modern Internasional
54	MLBI	Multi Bintang Indonesia
55	MNCN	Media Nusantara Citra
56	MPPA	Matahari Putra Prima
57	MTDL	Metrodata Electronies
58	ESTI	Ever Shine Textile Industry
59	PANR	Panorama Sentrawisata
60	PBRX	Pan Brothers
61	PICO	Pelangi Indah Canindo
62	PJAA	Pembangunan Jaya Ancol
63	PNBN	Bank Pan Indonesia
64	PNLF	Panin Financial
65	PNSE	Pujdiadi & Sons Estate
66	PRAS	Prima Alloy Steel
67	PWON	Pakuwon Jati
68	PYFA	Prydam Farma
69	RELI	Relience Securities
70	ROTI	Nippon Indosari Corporindo
71	SGRO	Sampoerna Agro
72	SIPD	Sierad Produce
73	SMDR	Samudera Indonesia
74	SQMI	Allbond Makmur Usaha
75	TLKM	Telekomunikasi Indonesia

76	TMPI	Agis
77	TRIO	Trikonsel Oke
78	TRUS	Trust Finance Indonesia
79	ULTJ	Ultra Jaya Milk
80	UNVR	Unilever Indonesia
81	VOKS	Voksel Electric
82	WINS	Wintermar Offshore Marine
83	AUTO	Astra Otoparts
84	ALMI	Alumindo
85	BIMA	Primarindo Asia Infrastructure
86	BRAM	Indo Kordsa
87	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia
88	BTON	Betonjaya Manunggal
89	BUDI	Budi Acid Jaya
90	FASW	Fajar Surya Wisesa
91	DVLA	Darya Varia Laboratoria
92	GGRM	Gudang Garam
93	GJTL	Gajah Tunggal
94	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna
95	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur
96	IGAR	Champion Pasific Indonesia
97	IMAS	Indomobil Sukses Internasional
98	INAF	Indofarma
99	INAI	Indal Alumunium Industry
100	INDF	Indofood Sukses Makmur
101	INTP	Indocement Tunggal Perkasa
102	JPRS	Jaya Pari Steel
103	KAEF	Kimia Farma
104	KBLI	KMI Wire and Cable
105	KDSI	Kedawung Setia Industrial
106	KICI	Kedaung Indah Can
107	KLBF	Kalbe Farma
108	LION	Lion Metal Works
109	LMSH	Lionmesh Prima
110	LPIN	Multi Prima Sejahtera
111	MASA	Multistrada Arah Sarana
112	MLIA	Mulia Industrindo
113	NIPS	Nipress
114	POLY	Asia Pacific Fibers
115	PSDN	Prasidha Aneka Niaga

116	RICY	Ricky Putra Globalindo
117	RMBA	Bentoel Internasional Investama
118	SMSM	Selamat Sempurna
119	SMCB	Holcim Indonesia
120	SCCO	Supleme Cable Manufacturing & Commerce
121	SIAP	Sekawan Intipratama
122	SPMA	Suparma
123	SRSN	Indo Acidatama
124	SKLT	Sekar Laut
125	TCID	Mnadon Indonesia
126	TSPC	Tempo Scan Pasific
127	TOTO	Surya Toto Indonesia
128	TRST	Trias Sentosa
129	YPAS	Yanaprima Hastapersada
130	BJBR	Bank Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 2

CHECKLIST PENGUNGKAPAN SUKARELA

BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PASAR MODAL (BAPEPAM)

NO: KEP-134/BL/2006

TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

ITEM PENGUNGKAPAN		TANPA BOBOT
IKTISAR DATA KEUANGAN PENTING		
1	Penjualan/pendapatan usaha	1
2	laba (rugi) kotor	1
3	laba (rugi) usaha	1
4	laba (rugi) bersih	1
5	saham beredar	1
6	laba (rugi) bersih per saham	1
7	performa penejualan/pendapatan usaha	1
8	performa laba (rugi)bersih	1
9	performa laba (rugi) bersih per sahan	1
10	modal kerja bersih	1

11	jumlah aktiva	1
12	jumlah investasi	1
13	jumlah kewajiban	1
14	jumlah ekuitas	1
15	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aktiva	1
16	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	1
17	rasio lancar	1
18	rasio kewajiban terhadap ekuitas	1
19	rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva;	1
20	informasi harga saham	1
Total		20
LAPORAN DEWAN KOMISARIS		
1	penilaian kinerja direksi	1
2	prospek usaha disusun oleh komisaris	1
3	komite dibawah dewan komisaris	1
4	perubahan komposisi dewan komisaris	1
Total		4
LAPORAN DIREKSI		
1	kinerja perusahaan	1
2	prospek usaha disusun oleh direksi	1
3	penerapan tata kelola perusahaan	1
4	perubahan komposisi anggota direksi	1
Total		4
PROFIL PERUSAHAAN		
1	nama & alamat	1
2	sejarah singkat	1
3	produk dan atau jasa	1
4	struktur organisasi	1
5	visi dan misi	1
6	nama, jabatan, dan riwayat hidup dewan komisaris	1
7	nama, jabatan, dan riwayat hidup direksi	1
8	jumlah karyawan	1
9	nama pemegang saham	1
10	nama anak perusahaan	1
11	kronologis pencatatan saham	1
12	kronologis pencatatan Efek lainnya	1
13	nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek	1
14	nama dan alamat lembaga penunjang pasar modal;	1
15	penghargaan dan sertifikasi	1

Total		15
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN		
1	tinjauan operasi per segmen usaha,	
	a) produksi;	1
	b) penjualan/pendapatan usaha;	1
	c) profitabilitas; dan	1
	d) peningkatan kapasitas produksi;	1
2	perbandingan analisis kinerja keuangan	
	a) uraian mengenai aktiva	1
	b) uraian mengenai kewajiban	1
	c) penjualan/pendapatan usaha;	1
	d) beban usaha	1
	e) laba bersih	1
3	kemampuan membayar hutang	1
4	ikatan material untuk investasi barang modal	1
5	informasi keuangan tentang kejadian luar biasa	1
6	komponen substansial dari pendapatan/beban	1
7	dampak perubahan harga	1
8	informasi setelah tanggal laporan akuntan	1
9	prospek usaha perusahaan	1
10	strategi pemasaran	1
11	kebijakan dividen	1
12	informasi material	1
13	pengaruh perubahan perundang undangan	1
Total		20
TATA KELOLA PERUSAHAAN		
1	Informasi Dewan komisaris	1
2	informasi direksi	1
3	informasi komite audit	1
4	informasi komite nominasi dan komite remunasi	1
5	tugas dan fungsi sekretaris perusahaan	1
6	sistem pengendalian interen	1
7	risiko yang dihadapi perusahaan	1
8	tanggung jawab sosial	1
9	perkara penting yang dihadapi emiten	1
10	tempat/alamat perusahaan yang dapat dihubungi	1
Total		10
TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN		1

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAS DIAUDIT	1
TANDA TANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	1
TOTAL KESELURUHAN	76

